PENDIDIKAN ISLAM DI TENGAH REALITAS KEMAJEMUKAN: PARADIGMA KEILMUAN ATAU KEAGAMAAN?

Ilyas Yasin[31]

Abstract:

The style of life that today's increasingly global integration as well as the potential to cause disintegration of social life. On the one hand, globalization leads to both at the level of interdependence between human consciousness and praxis of life, while on the other hand, globalization has also resulted in re-strengthening of primordial sentiments of religion and ethnicity in public spaces. As a form of formal engineering of the mind and behavior of children and society, Islamic education paradigm is being tested for their ability to respond to and solve this problem both in national and world level. In this context the paradigm of Islamic education is challenged to redefine the formulation of the paradigm: does the discourse of science or religious discourse or discourses available alternatives? But whatever the choice, the second paradigm has serious implications for the philosophy and practice of Islamic education. This paper, in addition to elaborate on the challenges facing the contemporary paradigm of Islamic education vis-à-vis the reality of pluralism also elaborated on the consequences and side-effect of the discourse on the second option and look for the possibility of an alternative discourse of Islamic education paradigm. Thus, expected to be born a paradigm of Islamic education is not only true to the roots of philosophical, historical, and cultural traditions of the Muslims but also remain open to positive values from the outside.

Keywords: *Islam, Pluralism, Value, Absolute, Relative.*

A. Pendahuluan

Dilihat dari berbagai sudut pandang, Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat pluralitas cukup tinggi di dunia baik pluralitas etnis, ras, agama, bahasa, budaya, demografis maupun geografis. Penduduk Indonesia saat ini mencapai sekitar 240 juta jiwa, terdiri atas 17.667 pulau, 500 suku dan 512 bahasa daerah serta tersebar dalam enam agama besar dunia yakni Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan

[31] Dosen PAI STKIP YAPIS Dompu, NTB. Email: ilyasdompu73@yahoo.co.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kunghucu, belum termasuk sekian banyak agama lokal maupun berbagai aliran kepercayaan. CE. Beeby melukiskan bahwa "keragaman yang terdapat di negeri ini begitu banyak sehingga ia seolah-olah terdiri atas selusin dan bukannya satu bangsa!".[32] Bila berbagai keragaman ini dapat dikelola secara baik maka ia dapat menjadi salah satu kekuatan yang efektif dan sumber kemajuan bangsa di masa depan. Namun jika sebaliknya, keragaman tersebut dapat menjadi ancaman dan sumber disintegrasi yang menakutkan. Berbagai kasus kekerasan etnik, agama maupun separatisme sejak pascakemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru maupun orde reformasi menunjukkan kegagalan negara dalam mengatur dan mengelola berbagai keragaman yang ada. Di masa depan, potensi ancaman seperti ini bersifat laten.

Pada saat yang sama, derasnya arus globalisasi dunia saat ini telah membuat upaya untuk menata pluralitas bangsa juga bertambah kompleks. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi telah membentuk dunia tanpa batas (*boardless of the world*) dan desa global (*global village*). Corak globalisasi yang demikian melahirkan dua hal yang paradoks. Di satu sisi era keterbukaan ini mendorong warga dunia cenderung memiliki *sense of belonging* dalam menyikapi berbagai targedi dan problem kemanusiaan sehingga hal tersebut justru menguntungkan dalam membentuk solidaritas global. Tapi di sisi lain, corak globalisasi tersebut justru semakin mendorong orang untuk kembali kepada ikatan-ikatan primordialnya sehingga dapat mengancam pembentukan kesadaran dan solidaritas global di atas. Timbulnya berbagai pergesekan antaretnis, antarkomunitas, maupun kekerasan atas nama agama serta terorisme keagamaan merupakan diantara sedikit contoh tentang gejala ini.

Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, pendidikan Islam kini dihadapkan pada tantangan untuk merespon berbagai permasalahan di atas. Sebagai subsistem pendidikan nasional, pendidikan Islam harus secara proaktif membantu memecahkan persoalan nasional dan global saat ini yakni bagaimana merumuskan suatu pola pendidikan yang tidak hanya berfokus pada konteks keislaman (*inward looking*) tapi juga berorientasi dan mengakomodasi kebutuhan nasional dan global. Secara spesifik, dalam posisinya sebagai agama mayoritas di Tanah Air, tentu saja keberhasilan pendidikan Islam mengatasi persoalan ini akan menjadi kajian menarik dimana Islam mampu mengantarkan bangsa Indonesia sebagai negara Muslim demokratis terbesar di dunia.

Salah satu kajian terbaru dalam wacana pendidikan saat ini adalah pendidikan multikultural yakni suatu sistem pendidikan yang menekankan pentingnya menghargai berbagai kemajemukan yang ada. Terdapat dua alasan utama dilaksanakannya pendidikan multikultural di Indonesia yakni, *pertama*, adanya kemajemukan budaya,

[32] CE. Beeby, *Pendidikan di Indonesia: Penilaian dan Pedoman Perencanaan* terj. BP3K dan YIIS. (Jakarta: LP3ES, 1982), h. 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

etnisitas, faham dan religi yang terdapat dalam masyarakat; dan *kedua*, kecenderungan tatanan masyarakat masa depan dengan cirinya yakni era globalisasi.[33] Tetapi menurut penulis, pentingnya pendidikan multikultural tidak semata karena adanya pluralitas dalam kehidupan berbangsa maupun corak globalisasi yang makin membuat kehidupan makin terbuka tapi juga kenyataan bahwa agama dewasa ini telah 'diperalat' menjadi kekuatan ideologis kelompok tertentu untuk menghancurkan kemanusiaan, salah satunya melalui kegiatan dan aksi-aksi terorisme keagamaan.

Dalam beberapa tahun terakhir, tampak jelas terjadinya peningkatan eskalasi konflik-konflik bernuansa etnik maupun agama di Tanah Air.[34] Terlepas dari kemungkinan adanya konspirasi dan invasi gerakan transnasional dalam meningkatknya eskalasi kekerasan tersebut, satu hal yang pasti bahwa munculnya berbagai konflik di atas secara tidak langsung menunjukkan kegagalan pendidikan agama selama ini. Dalam konteks ini, pendidikan (agama) Islam telah gagal atau sengaja ditelikung oleh kekuatan-kekuatan tertentu sehingga tidak lagi menampilkan wajah Islam yang ramah, humanis dan demokratis. Beberapa kalangan mensinyalir bahwa masuknya berbagai paham dan gerakan keagamaan yang mengusung ideologi kekerasan terutama pascareformasi tidak saja telah mengubah wajah Islam Indonesia yang toleran dan demokratis menjadi intoleran, progresif dan anarkis tapi juga menghancurkan berbagai corak Islam berwajah lokal. Invasi gerakan tersebut bahkan telah menyusup masuk ke dalam berbagai ormas, kampus, dan birokrasi.[35] Fakta ini menunjukkan bagaimana pendidikan (agama) menjadi instrumen efektif dalam mendorong sebuah transformasi sosial. Mengingat strategisnya fungsi pendidikan tersebut maka penting bagi kita untuk memastikan bahwa orientasi maupun konstruksi pendidikan Islam memiliki kemampuan untuk mengakomodasi serta merespon berbagai persoalan sosial baik di tingkat negara-bangsa (*nation-state*) maupun tantangan dunia global. Dalam konteks ini pula, penting bagi kita untuk merumuskan sebuah formula dan paradigma pendidikan yang tepat dan benar sesuai dengan tantangan zamannya.

Tetapi apa itu pendidikan Islam? Secara implisit kata 'pendidikan Islam' mengandung dua aspek yaitu aspek 'pendidikan' dan 'Islam'. Aspek pertama mengacu pada serangkaian pemikiran dan praktik pendidikan yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik baik secara formal, informal maupun nonformal. Sedangkan aspek kedua merujuk pada suatu sistem keyakinan dan praktik keagamaan yang bersumber

---

[33] Syamsun Ni'am, "Islam dan Pendidikan Multikultur di Indonesia" Jurnal *Fitrah* Vol. 2, No. 1, Maret 2010 (Bima: STIT Sunan Giri), h.74.

[34] Lihat misalnya, Suhadi Cholil dkk, *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2009*. (Yogyakarta: CRCS-UGM, 2010).

[35] Lihat Abdurrahman Wahid (ed), *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasioanl di Indonesia* (Jakarta: Maarif Institute-Gerakan Bhineka Tunggal Ika-The Wahid Institute-LibForAll Foundation, 2009) dan Zuly Qodir, *Gerakan Sosial Islam: Manifesto Kaum Beriman* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari tuhan. Dengan demikian istilah 'pendidikan Islam' mengandung pengertian sebagai sebuah sistem dan praktik pendidikan yang bersumber dari serta ditujukan untuk mewariskan sistem keyakinan dan praktik keberagamaan Islam. Menurut Soejoeti terdapat tiga pengertian "pendidikan Islam". *Pertama*, jenis pendidikan yang pendirian dan penyelenggaraannya didorong oleh hasrat dan semangat cita-cita untuk mengejewantahkan nilai-nilai Islam baik yang tercermin dalam nama lembaganya maupun dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakannya. Dalam konteks ini kata 'Islam' ditempatkan sebagai sumber nilai yang akan diwujudkan dalam seluruh kegiatan pendidikannya. *Kedua*, jenis pendidikan yang memberikan perhatian dan sekaligus menjadikan ajaran Islam sebagai pengetahuan untuk program studi yang diselenggarakannya. Di sini kata Islam ditempatkan sebagai bidang studi, sebagai ilmu dan diperlakukan seperti ilmu yang lain. *Ketiga*, jenis pendidikan yang mencakup kedua pengertian itu. Dalam hal ini, Islam ditempatkan sebagai sumber nilai dan sebagai bidang studi yang ditawarkan melalui program studi yang diselenggarakannya.[36] Berdasarkan pengertian di atas, yang dimaksud dengan 'pendidikan Islam' dalam tulisan ini adalah suatu sistem pendidikan yang menjadikan nilai-nilai Islam sebagai sumber aspirasinya. Dengan demikian pendidikan Islam di sini mencakup pendidikan yang diselenggarakan di lingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah. Namun untuk keperluan kajian ini maka pembahasan makalah ini akan difokuskan pada praktik pendidikan formal.

Akan tetapi sebelum itu, penting kiranya untuk membedakan antara 'pendidikan Islam' dan 'pendidikan agama Islam'. Pendidikan Islam merupakan keseluruhan konstruksi filosofis dan praktik pendidikan Islam itu sendiri, sedangkan pendidikan agama Islam (PAI) hanyalah salah satu bagian terkecil dari pendidikan Islam. Dengan kata lain, pendidikan Islam merupakan pendidikan dalam konteks makro, sedangkan pendidikan agama Islam lebih pada skala mikronya. Dalam tulisan ini kedua istilah tersebut akan dipergunakan secara bergantian tetapi dengan makna yang relatif sama.

B. Problem Pendidikan Islam

Pendidikan Islam merupakan hasil konstruksi dari pergumulan antara landasan-landasan normative agama (wahyu, sunnah) dengan realitas sosial yang dihadapi kaum Muslim. Sebagai hasil konstruksi dari pengalaman hidup kaum Muslim, secara konseptual pendidikan sudah cukup teruji kemampuannya untuk menata dan mengantarkan kaum Muslim mencapai tingkat peradaban yang tinggi dari abad 9 sampai abad 11 masehi. Dalam konteks kekinian pun pendidikan Islam masih memiliki potensi yang sama. Menurut Tilaar terdapat tiga nilai luhur yang terkandung dalam

[36] A. Malik Fadjar, *Visi Pembaruan Pendidikan Islam* (Jakarta: LP3NI, 1998), h. 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan Islam yaitu (1) salah satu kekuatan budaya, (2) pengimbang pendidikan sekuler, dan (3) menyajikan pendidikan alternative. Karena itu pengembangan pendidikan Islam tetap relevan untuk diaktualkan kembali.[37]

Kendati demikian, harus pula diakui bahwa keberadaan pendidikan Islam kini seperti sudah kehilangan elan vitalnya lantaran mengidap sejumlah kelemahan baik secara filosofis maupun praktis. Menurut Azizy beberapa kelemahan pendidikan Islam adalah (1) lebih banyak mengajarkan hafalan daripada nilai-nilai yang harus dipraktikkan (2) lebih menekankan pada hubungan formalitas antara hamba dengan Tuhannya (3) kurang memperhatikan penalaran dan argumentasi berpikir (4) kurang menekankan pada aspek penghayatan (5) metode pengajaran Islam kurang mendapat garapan (6) ukuran keberhasilan pendidikan agama masih formalistis (7) pendidikan agama belum dijadikan fondasi pendidikan karakter anak didik dalam perilaku keseharian.[38]

Secara kategoris kelemahan pendidikan Islam menurut Andi Rasydianah adalah (1) dalam teologi, ada kecenderungan mengarah pada faham fatalistik (2) bidang akhlak sekedar dimaknai sebagai urusan sopan santun dan belum dipahami sebagai keseluruhan pribadi manusia beragama (3) bidang ibadah diajarkan sebagai kegiatan rutin agama dan kurang ditekankan sebagai proses pembentukan kepribadian (4) dalam bidang hukum/fiqih cenderung dipelajari sebagai tata aturan yang tidak akan berubah sepanjang masa; dan kurang memahami dinamika dan jiwa hukum Islam (5) agama Islam cenderung diajarkan sebagai dogma dan kurang mengembangkan rasionalitas serta kecintaan pada kemajuan ilmu pengetahuan (6) orientasi mempelajari Al-Quran masih cenderung pada kemampuan membaca teks, belum mengarah pada pemahaman arti dan penggalian makna.[39]

Sementara Muhaimin menunjukkan beberapa kelemahan yang hampir sama yakni (1) masih berpusat pada hal-hal yang bersifat simbolik, ritualistik, legal-formalistik dan kehilangan ruh moralnya (2) bertumpu pada penggarapan ranah kognitif dan paling jauh hingga ranah emosional (atau sebaliknya kurang memperhatikan ranah intelektual), tetapi tidak dapat mewujudkannya dalam tindakan nyata karena tidak tergarapnya ranah psikomotorik.[40] Sejumlah kelemahan pendidikan Islam tersebut di atas pada gilirannya berimplikasi pada lemahnya kemampuan adaptasi pendidikan Islam dengan realitas sosial yang ada. Dengan kata lain, system dan praktik pendidikan Islam

---

[37] HAR. Tilaar, *Membenahi Pendidikan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 77-80.

[38] Syukri, "Pendidikan Islam dalam Konteks Politik Pendidikan Nasional" Jurnal *Ulumuna* Vol. VII, Edisi 12 No. 2, Juli-Desember 2003 (Mataram: STAIN Mataram), h. 237.

[39] Andi Rasydianah "Butir-butir Pengarahan Dirjen Binbaga Islam" pada *Acara Pelatihan Peningkatan Wawasan Ilmu Pengetahuan dan Kependidikan Bagi Dosen Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum*, Bandung, 11 September 1995.

[40] Muhaimin, *Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2003), h.71 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah jauh tertinggal oleh dinamika dan perubahan sosial yang terjadi sehingga tak jarang ditemukan kesenjangan yang cukup jauh antara apa yang diajarkan dalam konsepsi-konsepsi pendidikan Islam dengan realitas yang ada di masyarakat. Pada gilirannya kesenjangan ini, bila terus berlangsung, jelas akan menimbulkan keterasingan pendidikan Islam di kalangan masyarakat Muslim sendiri. Bahkan lebih buruk lagi bila peserta didik mulai kehilangan simpati, kepercayaan dan kebanggaannya terhadap konsepsi agamanya sendiri. Oleh karena itu, melakukan evaluasi dan mereorientasi dasar-dasar filosofis maupun praktik pendidikan Islam menjadi kebutuhan tak terelakkan.

C. Pendidikan Islam: antara Wacana Keilmuan dan Keagamaan

Untuk melihat dan mengetahui bagaimana konsepsi pendidikan Islam terhadap realitas kemajemukan sosial dan agama tentu harus dimulai dengan melihat pandangan-pandangan teologis Islam itu sendiri. Sebab seperti kata Langgulung mustahil kita memahami pendidikan Islam tanpa memahami Islam sendiri, yakni suatu kekuatan yang memberi hidup bagi suatu peradaban raksasa yang salah satu buahnya adalah pendidikan. Pendidikan ini wujud bukan secara kebetulan di tengah-tengah rakyat yang kebetulan adalah orang-orang Islam, tetapi dihasilkan dalam bentuk seperti ia dihasilkan itu sebab orang-orang yang membawanya ke wujud ini adalah orang-orang Islam dan bernafas di dalam alam jagat yang penuh dengan udara Islam.[41]

Dari aspek *contents,* isi pendidikan Islam memiliki sejumlah karakteristik yang digali dari al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw sebagai sumber ajaran Islam. Karakteristik pertama tampak pada kriteria pemilihannya, yaitu iman, amal, akhlak, dan sosial. Dengan kriteria tersebut pendidikan Islam merupakan pendidikan keimanan, ilmiah, amaliah, moral, dan sosial. Isi pendidikan Islam mencakup tiga hal yakni, *pertama*, isi pendidikan Islam berkaitan dengan sebuah tujuan besar yaitu beriman kepada Allah serta menjalin hubungan individu, masyarakat, dan umat manusia dengan *al-khaliq* sehingga kehidupan menjadi bertujuan dan memiliki orientasi yang jelas di jalan yang benar menuju rida Allah. *Kedua*, amal saleh, saling mengingatkan agar menaati kebenaran (isi ini sejalan dengan ilmu yang bertujuan menyingkap hakikat dan mencari kebenaran), dan saling mengingatkan agar menaati kesabaran (isi ini melambangkan pendidikan akhlak, karena kesabaran merupakan inti akhlak yang disebut di dalam al-Quran lebih dari seratus kali). *Ketiga*, pendidikan sosial, mencakup kerjasama dalam menumbuhkan keimanan dan amal saleh serta saling mengingatkan agar menaati kebenaran dan menaati kesabaran.[42]

---

[41] Hassan Langgulung, *Asas-Asas Pendidikan Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1988), h. 27.

[42] Dirjen Binbaga Islam Depag, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, Buku Kedua (Jakarta: Dirjen Binbaga Islam, 2002), h. 35-36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara singkat, dapat dikatakan bahwa inti pendidikan agama Islam adalah penanaman iman yakni bagaimana menjadikan anak didik orang yang beriman.[43] Namun meski secara normatif isi maupun tujuan pendidikan cukup idealistik tapi dalam praktiknya seringkali jatuh pada pendekatan pembelajaran bercorak teologis dan mengarah pada semangat klaim kebenaran (*truth claim)*. Padahal *truth claim* yang dipahami secara mentah dan emosional akan menimbulkan masalah. Menurut Abdullah diantara ciri-ciri pembelajaran model teologi (*ulum al-Din*) ini adalah, *pertama*, berorientasi dan menitikberatkan pada segi keimanan atau kepercayaan semata (*confessional*). Umumnya model pembelajaran ini tidak menaruh perhatian yang cukup pada wilayah atau dimensi-dimensi keberagamaan manusia yang lain. Pembelajaran bercorak teologis biasanya cenderung bersifat "parochial, eksklusif, dan karena itu sectarian dan ideologis.[44] *Kedua*, seringkali terjebak pada sifat-sifat *parochial* (hanya terbatas untuk lingkungan sendiri saja, dan kurang peduli pada kelompok di luar diri dan kelompoknya). *Ketiga*, sifat-sifat bawaan lain yang tidak dapat dihindari adalah eksklusivitas (tertutup; hanya untuk kalangan sendiri), *sectarian* (fanatic kepada kelompoknya sendiri dan tidak toleran terhadap kelompok yang lain) dan ideologis (pernyataan dan program-programnya terkait dengan politik, social dan ekonomi).

Keempat, apologetic (mempertahankan eksistensi kelompok sendiri dan kurang berminat mempertahankan dan membela kepentingan kelompok lain) adalah akibat langsung dari akumulasi sifat-sifat tadi. *Kelima*, pada aras teologi ini kadang juga membahas sejarah agama-agama atau perbandingan agama tetapi dengan semangat normative yaitu telaah atau kajian agama lain sesuai dengan norma-norma dan patokan dasar yang telah ditentukan benar-tidaknya secara sepihak oleh kelompoknya sendiri, non-dialogis. *Keenam,* dalam bahasa studi agama kontemporer, kecenderungan teologis ini dikenal dengan sebutan (*theistic) subjectivism*, yaitu kebertuhanan dan keberagamaan yang dibatasi dan dideterminasi oleh semangat "subjektivitas" kepercayaan kelompok-kelompok social, baik subjektivitas itu disebabkan karena factor bahasa yang berbeda-beda (Arab, Inggris, Mandarin, Tagalok) atau oleh kondisi geografi (daratan, lautan, kepulauan, pegunungan) maupun tingkat kemajuan pendidikan atau tingkat literasi keberagamaan yang manusia miliki.[45]

Singkatnya*,* pendekatan teologis cenderung membawa kepada semangat *truth claim* yang berbahaya. Sementara *truth claim* yang berjalan tanpa mekanisme kontrol dari "luar" mudah mengarah pada dogmatisme dan fanatisme sempit. Tanpa disertai mekanisme kontrol yang jelas, agak sulit menentukan batas-batas antara bentuk

[43] Ahmad Tafsir, *Metodologi Pengajaran Agama Islam* (Bandung: Rosdakarya, 2003), h. 124.
[44] Donald Wiebe, "Religious Studies" in John R. Hinnells (ed), *The Routledge Companion to the Study of Religion*. London: Routledge, 2005, h. 99.

[45] M. Amin Abdullah, "*Religious Studies in Indonesia: Rethinking atau Reinforced?* Makalah Diskusi Publik "Rethinking Religious Studies in Indonesia", *Center for Religious and Cross-Cultural Studies*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 26 Juni 2010, h.2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

commitment sehat yang dituntut agama dan fanatisme sempit yang dicegah agama.[46] Hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa pendekatan teologis cenderung melihat perbedaan-perbedaan (*difference*) daripada kesamaan di dalam agama-agama. Sementara kehadiran "yang lain" berkat komunikasi mau tak mau mengusik orientasi teologi. "Yang lain" itu ada dan banyak, dan hadir begitu dekat bahkan kita tinggal di antara mereka. Pluralitas adalah fakta sosial, historis, dan sehari-hari. Kita bertanya bagaimana bersikap terhadap "yang lain" tersebut. Pluralitas agama dan pluralisme agama pada umumnya akan memengaruhi, mengubah pemahaman akan agama, bahkan pemahaman dan pengalaman kita akan Allah. Perubahan sikap mulai dari memandang "yang (beragama) lain" sebagai musuh, mentolerir keberadaan mereka, sampai sikap bukan saja menghormati mereka bahkan memandang kehadiran mereka "yang lain" itu bermakna baginya.[47]

Dalam posisinya sebagai *ultimate goal* maka menghindari pendekatan teologis dalam pendidikan dan pembelajaran agama memang hampir mustahil, apalagi bila diingat bahwa teologi, seperti dikemukakan Whaling pernah menjadi "ratunya ilmu-ilmu" (*queen of science*).[48] Namun demikian, dalam jangka panjang pendekatan pembelajaran agama semacam itu tentu akan menimbulkan masalah. Karena itu tak mengherankan bila masih menonjolnya pendekatan teologis tersebut menyebabkan wacana pluralisme agama dalam buku teks atau bahan ajar PAI di sekolah misalnya "masih mengedepankan pendekatan teologis-dogmatik baik menyangkut dimensi doktrin, dimensi praksis dan dimensi historis".[49] Hal itu wajar karena memang masalah pluralitas agama di Indonesia tampak tidak mendapat perhatian berarti dalam buku teks pendidikan agama.[50] Wacana pluralisme agama umumnya memuat beberapa konsep mendasar dalam diskursus keagamaan seperti masalah klaim kebenaran yang mencakup klaim finalitas, kesempurnaan, keselamatan, dan keaslian agama.[51] Bila wacana pluralisme agama seperti ini diabaikan maka akan mendorong lahirnya sikap-sikap keberagamaan yang eksklusif dan ekstrem.

---

[46] M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 50.

[47] Alex Soesilo Wijoyo, "Globalisasi dan Pluralisme Agama" Jurnal *Ulumuna*, Vol. 3 No. 2, Mei-Juli 2000.(Mataram: STAIN Mataram), h. 4 .

[48] Frank Whaling, "Pendekatan Teologis" dalam Peter Cannoly (ed), *Aneka Pendekatan Studi Agama*, terj. Imam Khoiri (Yogyakarta: LKiS, 2011), h. 318.

[49] Abdul Wahid, "Tendensi Antipluralisme Dalam Pendidikan Agama Islam: Kritik Teks Buku Ajar PAI SMU/SMK", Jurnal *Ulumuna*, Vol. VII, Edisi 2, Juli-Desember 2003 (Mataram: STAIN Mataram), h.308 .

[50] Noblana Adib, "Multicultural Education: A Study of Religious Education Textbooks Used in Elementary School in Indonesia" dalam *Kumpulan Makalah The 11TH Annual Conference on Islamic Studies* (Jakarta: Dirjen DIKTIS Kemenag-STAIN Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung, 2011), h. 460.

[51] Abdul Wahid, *loc.cit.*, h. 330.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya adanya klaim kebenaran bagi setiap agama seperti itu adalah sangat absah adanya, karena tanpa klaim tersebut maka agama sebagai system kehidupan tidak akan memiliki kekuatan simbolik yang cukup menarik bagi setiap pengikutnya. Selain itu, agama mempunyai asumsi dasar perlunya manusia mempunyai pegangan hidup yang tidak berubah-ubah dan stabil. Karena itu setiap pemeluk agama akan berusaha memposisikan diri sebagai pelaku agamanya yang loyal, memiliki *personal commitment* (keterikatan diri) terhadap ajaran agamanya, memiliki semangat dedikasi dan bahkan berjuang serta berkorban untuk agamanya kalau memang diperlukan. Namun demikian, jika klaim kebenaran dipahami secara mentah-mentah dan emosional maka akan menimbulkan banyak masalah karena walaupun agama mempunyai asumsi dasar perlunya manusia akan pegangan hidup yang tidak berubah-ubah dan stabil, tetapi kehidupan manusia itu sendiri penuh diwarnai dengan perubahan-perubahan, ketidakstabilan dan ketidakmenentuan. [52] Berdasarkan alasan ini maka paradigma dan praktik pendidikan agama Islam semestinya tidak melulu dilakukan secara dogmatic tapi juga secara rasional.

Oleh karena itu, pendekatan dalam pendidikan agama perlu mempertimbangkan paradigma baru yakni tidak hanya paradigm normative tapi juga historis. Menurut Abdullah terdapat dua pendekatan dalam studi agama yakni historis dan normative. Pada umumnya, normativitas ajaran wahyu dibangun, diramu, dibakukan dan ditelaah lewat pendekatan doctrinal-teologis, sedang historisitas keberagamaan manusia ditelaah lewat berbagai sudut pandang pendekatan keilmuan social keagamaan yang bersifat multi dan interdisipliner, baik lewat pendekatan historis, filosofis, psikologis, kultural maupun antropologis. Menurut Abdullah, meski dengan corak yang berbeda namun dalam praktik hidup sehari-hari campur aduk antara kedua aspek tersebut tidak dapat dihindarkan. Dalam praktik di lapangan, campur aduk antara keduanya lebih umum terjadi daripada keterpisahan antara keduanya. Campur aduk dan ketertumpangtindihan antara keduanya menjadikan fenomena agama agama menjadi unik dan kompleks. Di satu sisi, ia bergayut dan terikat dengan unsur sakralitas-transendental, namun di sisi lain ia juga terkait langsung dengan fenomena budaya dan social yang profane. Konsekuensinya, memahami fenomena agama dibutuhkan peralatan metodologis yang khusus.[53]

Oleh karena itu, berbeda dari fenomena budaya dan social yang biasa, keteranyaman antara keduanya menjadikan fenomena agama, sekali lagi, menjadi sangat pelik dan kompleks. Menurut Abdullah, norma dan aturan agama yang diklaim sebagi yang bersumber dari 'ilahi', yang 'suci', yang 'samawi', yang 'sakral', yang '*ultimate*', menjadikan agama mempunyai ciri yang spesifik dan unik sekaligus

[52] Muhaimin, *Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2003), h. 58.

[53] M. Amin Abdullah, *Studi Agama ...., op. cit*., h. v.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membedakannya dari jenis-jenis pengalaman budaya dan social kemanusiaan yang lain. Dimungkinkan '*truth claim*' (klaim kebenaran tunggal) yang biasa terjadi dalam penganut agama-agama, sebagian bersumber dari apa yang disebut-sebut sebagai yang "suci" ini. Sampai di sini barangkali tidak masalah. Namun ketika apa yang disebut norma dari yang 'ilahi', yang 'suci', yang 'samawi', yang 'sakral', yang '*ultimate*' tersebut diungkapkan dalam bahasa dan budaya tertentu (Arab, Ibrani, Jawa, Cina, Latin, Inggris dan begitu seterusnya) maka serta merta campur tangan budaya dan social tidak dapat dihindarkan sama sekali. Belum lagi jika apa yang disebut-sebut sebagai norma-norma atau aturan-aturan agama tersebut telah berubah atau berpindah dari yang semula hanya merupakan "cita-cita", "gagasan", "keinginan", "angan-angan social" yang biasa disampaikan secara lisan menjadi "konsepsi" dan "rumusan" yang diungkapkan dalam bentuk tertulis dalam format teks, dalam format huruf, kalimat, subjek, predikat dan begitu seterusnya dan lebih-lebih lagi jika harus pula dikonkritkan atau dipersonafikasikan pula menjadi suriteladan atau panutan (*uswatun hasanah*), maka campur tangan historisitas kemanusiaan dan historisitas budaya dan historisitas budaya dan social sama sekali tidak dapat dihindarkan. Dengan demikian, fenomena ketercampuradukkan, ketertumpangtindihan, keteranyaman antara isi normativitas dan historisitas dari fenomena keberagamaan manusia dapat dipahami dan dapat dijelaskan secukupnya.[54] Hal itu, sebagaimana dikatakan Smart, disebabkan karakter dimensional agama. [55] Dengan memperkaya pendekatan pendidikan agama dengan beragam perspektif diharapkan akan lahir sebuah kesadaran baru akan pentingnya sikap koeksistensi diantara umat manusia umumnya.

D. Tantangan Pendidikan Islam

Uraian tersebut di atas mencoba menunjukkan bahwa pendidikan Islam atau PAI menghadapi tantangan untuk merespon pluralitas baik secara internal (pluralitas kebangsaan) maupun eksternal (pluralitas global). Untuk menghadapi pluralitas tersebut tentu tidak cukup dengan mengambil sikap pasif tapi harus proaktif. Oleh karena itu, dalam merespon realitas pluralitas tersebut maka secara umum terdapat beberapa opsi yang dapat dilakukan. *Pertama*, adalah sikap menerima kehadiran orang lain atas dasar konsep hidup berdampingan secara damai. Yang diperlukan adalah sikap tidak saling mengganggu. *Kedua* adalah mengembangkan kerjasama sosial keagamaan melalui berbagai kegiatan yang secara simbolik memperlihatkan dan fungsional mendorong proses pengembangan kehidupan beragama yang rukun. *Ketiga* adalah mencari,

[54] *Ibid.*
[55] Ninian Smart, "Kata Pengatar" dalam Peter Cannoly (ed), *Aneka Pendekatan Studi Agama*, terj. Imam Khoiri (Yogyakarta: LKiS, 2011), h. ix .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengembangkan dan merumuskan titik-temu agama-agama untuk menjawab problem, tantangan dan keprihatinan umat manusia.[56]

Dalam perspektif masa depan, opsi pertama dan kedua tidaklah cukup. Kita harus mengupayakan untuk mencapai opsi ketiga yakni membangun pemahaman yang positif antarumat beragama. Dalam konteks Indonesia, hal itu semakin penting mengingat bahwa kesadaran akan pluralitas atau multicultural dalam masyarakat Indonesia ternyata masih rendah. Ahimsa Putra misalnya, menunjukkan beberapa indikasi seperti, *pertama*, kurangnya penghargaan terhadap budaya dan agama lain. Sebagai contoh, meski banyak kaum Muslim memiliki teman dan menjalin relasi dengan temannya yang beragama Kristen, Hindu atau Budha tetapi hanya sedikit di antara mereka yang paham apa itu Kristen, Hindu atau Budha. *Kedua*, rendahnya keinginan untuk mengetahui dan mempelajari budaya atau agama lain. Hal itu tampak dari misalnya minimnya minat mahasiswa yang masuk ke jurusan ilmu budaya dibandingkan jurusan ekonomi atau FISIPOL. Lebih dari itu, di kalangan mahasiswa jurusan ilmu budaya tersebut jarang yang mau mengkaji atau meneliti budaya lain; umumnya mereka lebih suka meneliti budaya dari sukunya sendiri. *Ketiga*, rendahnya penghargaan terhadap budaya atau agama lain. Bahkan lebih dari itu banyak orang Indonesia yang tidak peduli terhadap budaya. Reformasi politik yang lalu ternyata tidak diikuti dengan reformasi untuk melihat kembali budaya dan tradisi.[57]

Oleh karena itu, dalam konteks dunia yang pluralistis pendidikan Islam menghadapi beberapa tantangan. Menurut Muhaimin diantara beberapa tantangan pendidikan Islam adalah, *pertama*, bagaimana PAI bisa menjaga akidah siswa dengan dukungan wawasan keilmuan Islam yang kokoh. *Kedua*, bagaimana PAI mampu mengajarkan agama dengan baik, jangan sampai menumbuhkan semangat fanatisme buta; menumbuhkan sikap intoleran di kalangan peserta didik dan masyarakat Indonesia; dan memperlemah kerukunan hidup beragama serta persatuan dan kesatuan nasional, karena diakui bahwa pengembangan pendidikan agama di madrasah/sekolah/pesantren ataupun di masyarakat berpotensi untuk mewujudkan integrasi atau disintegrasi dalam kehidupan masyarakat. Hal ini banyak ditentukan oleh pandangan teologi agama dan doktrin ajarannya, sikap dan perilaku pemeluknya dalam memahami dan menghayati agama tersebut, lingkungan social cultural yang mengelilinginya, dan peranan dan pengaruh pemuka agama, termasuk guru agama, dalam mengarahkan pengikutnya. *Ketiga*, bagaimana PAI dapat memacu siswa untuk lebih rajin dan pintar, serta kreatif, kritis dan inovatif. *Keempat*, bagaimana PAI bisa

[56] Djohan Effendi, "Pluralisme Realitas Sosial dan Hubungan Antaragama" dalam Mursyid Ali (Editor), *Pluralitas Realitas Sosial dan Hubungan Antaragama* (Jakarta: Balitbang Proyek Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama, 1999-2000), h. 14.

[57] Heddy Shri Ahimsa Putra, "Indonesia Cultural Pluralism Without Multiculturalism?" in Frank Dhont, Kevin W. Fogg, Mason C. Hoadley (ed.), *Towards an Inclusive Democratic Indonesia Society*, (tp:tt), h. 290-291.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi etika social, ada keterpaduan antara *personal religiousity* dengan *social religiousity*. Kelima bagaimana PAI bisa mencetak siswa yang bertanggungjawab baik terhadap diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara sebagai manifestasi dari sikap bertanggungjawab kepada Allah Swt.[58]

Intinya adalah bahwa pendidikan Islam tidak semata diarahkan untuk menjadi seorang hamba Allah yang saleh tapi juga menjadi warga negara yang baik, taat, dan demokratis sebagaimana tujuan pendidikan nasional yaitu "*berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri&menjadi warga negara yg demokratis serta bertanggungjawab*" (Pasal 3 UU No 20/2003). Oleh karena itu, dalam perspektif masa depan menurut Pranowo reformulasi pendidikan Islam mencakup lima unsur. *Pertama*, agama yang disajikan dalam proses pendidikan haruslah agama yang lebih menekankan pada kesalehan aktual, bukan kesalehan ritual semata, mengingat era ini akan diwarnai oleh "*trust*" dan juga kompetisi. *Kedua*, pendidikan Islam harus mampu menyiapkan generasi terdidik yang pluralis yang siap mengatasi kemajemukan baik internal maupun eksternal. *Ketiga*, pengembangan sifat pluralis harus merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya mewujudkan masyarakat madani yang demokratis dan terbuka dan beradab yang menghargai perbedaan pendapat. *Keempat*, masyarakat madani yang diharapkan adalah masyarakat yang penuh percaya diri, dan *kelima*, pendidikan yang dilakukan harus menyiapkan generasi yang siap berpartisipasi aktif dalam interaksi global.[59]

Namun ironisnya, di tengah hiruk-pikuknya wacana pluralisma agama selama ini guru-guru agama sebagai ujung tombak pendidikan agama, sejak dari TK sampai PT, nyaris tidak tersentuh oleh gelombang pergumulan pemikiran dan diskursus pemikiran keagamaan di seputar isu pluralisme dan dialog antar umat beragama selam hampir 30 tahun terakhir. Akibatnya, seperti dikemukakan Abdullah, dalam *mind set* mereka, pada umumnya masih terpanggil dan terinstal untuk mengajarkan agama dengan materi, cara dan metode yang sama dengan asumsi dasar, keyakinan dan praanggapan-praanggapan mereka bahwa anak didik, masyarakat dan umat di luar pagar sekolah seolah-olah hidup dalam komunitas yang homogen, dan bukannya heterogen, secara keagamaan. Anak didik tidak dibekali apa-apa ketika mereka keluar dari pagar sekolah, gereja, mesjid menghadapi realitas masyarakat yang majemuk secara keagamaan. Paradigma pendidikan agama masih terbatas pada paradigm lama yaitu *know to do* dan *to be*. Pendidikan agama belum mempunyai konsep yang *workable* dan *applicable* dalam hal yang terkait dengan *to live together* dalam masyarakat yang terbuka dan majemuk.[60]

---

[58] Muhaimin, *op. cit*., h. 72-73.
[59] Syukri, *op.cit*., h. 245.
[60] M. Amin Abdullah, "Agama dan (Dis) Integrasi Sosial: Tinjauan Materi dan Metodologi Pengajaran Agama (Kalam dan Teologi) dalam Era Kemajemukan di Indonesia" Jurnal *Ulumuna*, Vol. 3 No. 2, Mei-Juli 2000 (Mataram: STAIN Mataram), h. 22-23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh sebab itu, bertolak dari berbagai permasalahan dan tantangan pendidikan Islam sebagaimana dikemukakan di atas, Abdullah menjelaskan bahwa ke depan paradigma pendidikan agama (Islam) harus diarahkan pada upaya untuk mewujudkan semacam konsep *social contract* dimana semua individu dan kelompok mempunyai *platform*, hak dan kewajiban yang sama, meskipun berbeda ras, suku, golongan, agama dan kepercayaan yang dianut. Sayangnya, menurut Abdullah, konsep *social contract* kurang begitu dikenal dan kurang mendapat perhatian, penajaman serta titik tekan dalam pengajaran dan pendidikan agama yang berjalan sekarang ini. Materi pendidikan agama lebih terfokus dan sibuk mengurusi urusan untuk kalangan sendiri (*individual* atau *private affairs*) dalam bentuk *al-ahwal al-syaksiyah* (individu atau *private morality*) dan kurang begitu peduli pada isu-isu umum dan *al-ahwal al-ummah* (*public morality*; *public affairs*).[61]

Pada masa Menteri Agama Mukti Ali tahun 1970-an, beliau memperkenalkan istilah yang cukup popular yakni *agree in disagreement* (setuju dalam perbedaan) sebagai fondasi dalam membangun kerukunan umat beragama. Namun Abdullah menilai bahwa mewujudkan kerukunan beragama melalui semboyan tersebut hanya bersifat sesaat. Sebab pada level level kehidupan sosial dan publik, bukan pola *agree in disagreement* yang diperlukan melainkan model "*social contract*". Dalam konsep "*agree. in disagreement*" masih tampak corak pendekatan Teologi dan Kalam yang cukup menonjol dan terlalu kental di situ lantaran *disagreement* masih sempat ditonjolkan, sedang komponen "*agree*"nya bisa saja cepat tertindih oleh "*disagreement*"nya. Sedangkan *state of mind*, mentalitas dan cara berpikir serta bertindak yang tersembunyi di balik kata kunci kontrak social adalah sebuah asumsi dan keyakinan bahwa kita semua sejak semula memang berbeda dalam banyak hal, lebih-lebih dalam bidang aqidah, iman, kredo, tetapi demi untuk menjaga keharmonisan, keselamatan, integrasi social dan kepentingan bersama dan kelompok (*social survival*), mau tak mau, kita harus rela untuk menjalin kerjasama (*cooperation*) dalam bentuk kontrak social antara sesama kelompok dan warga masyarakat, yang sejak semula memang sudah berbeda ditinjau dari sudut pandang apapun.[62]

Oleh karena itu, sekali lagi kita memerlukan sebuah paradigma baru dalam pendidikan Islam; bukan sekedar paradigma keagamaan dengan pendekatan teologis yang cenderung dogmatik terhadap agama sendiri dan pada saat yang sama penuh prasangka serta *prejudice* pada agama orang lain melainkan paradigma pendidikan yang inklusif dan peduli terhadap persoalan bersama. Mahfud mengemukakan bahwa paradigma pendidikan yang diharapkan adalah terciptanya sikap siswa/peserta didik

[61] *Ibid*., h. 25.
[62] *Ibid*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mau memahami, menghormati, menghargai perbedaan budaya, etnis, agama dan lainnya yang ada di masyarakat. Bahkan jika dimungkikan mereka bisa bekerjasama.[63]

Oleh karena itu, tugas para perumus dan pemimpin pendidikan menjadi sangat penting di sini. Razik&Swanson menyatakan bahwa mutu pendidikan sangat dipengaruhi oleh kapasitas seorang pemimpin dalam memadukan visi, tindakan, dan analisis dalam mengevaluasi efektivitas organisasi yang dipimpinnya. Pemimpin pendidikan juga harus mampu mengantisipasi berbagai perubahan dan dinamika yang terjadi baik pada tingkat internal maupun global.

> *For educational leaders to be succesfull today and in the future, these leaders must be able to blend their visions, actions, and analyses in order to evaluate their organizations missions and effectiveness and to determine whether instituting change or maintaining the status quo is appropriate and effective for their organizations. Because schools are affected continually by changes and pressures from their internal and external environments, educational leaders must be able to anticipate change, develop a broad knowledge base, and be cognizant of external and internal dynamics throughout the world, not just those of their local communities.*[64]

Untuk itu, diharapkan pembuatan kebijakan pendidikan ke depan harus terkoordinasi dalam semua sektor secara terintegrasi. Dengan kata lain, paradigma pendidikan agama Islam tidak boleh hanya untuk kepentingan pendidikan agama Islam itu sendiri dan melepaskan diri dari konteks sosialnya termasuk realitas pluralitas sebagai bangsa maupun sebagai warga dunia. Namun sebaliknya, pendidikan Islam juga tidak boleh semata diperlakukan sebagai paradigma keilmuan *an sich* sehingga menimbulkan *side-effect* yang tidak dikehendaki berupa terjadinya pendangkalan apalagi melahirkan sikap sekularistis dalam praktik pendidikan Islam. Dalam konteks dunia yang makin pluralistis seperti dewasa ini, Olsen dkk mengingatkan bahwa kebijakan pendidikan yang tepat memiliki peran strategis bagi keunggulan, kelangsungan dan keamanan kehidupan global serta demokrasi di masa depan:

> *…education policy in the twenty-first is the key to global security, sustainability and survival…education policies are central to such global mission…a deep and robust democracy at national level requires strong civil society based on norms of trust and active response citizenship and that education is central to such a goal. Thus, the strong education state is necessary to sustain democracy at the national level so that strong democratic nation-states can buttress forms of*

[63] Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 5.
[64] T. Razik& A. Swanson, *Fundamental Concepts of Educational Leadership and Management* (New Jersey: Prentice-Hall, 1995), h. 558.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

international governance and ensure that globalization becomes a force for global sustainability and survival….[65]

Akhirnya harus dikatakan bahwa paradigma maupun kebijakan pendidikan yang tepat dan benar tidak saja berpengaruh bagi individu peserta didik tapi juga bagi negara dan dunia global. Dalam konteks pendidikan Islam, paradigm pendidikan dimaksud tidak semata berkaitan dengan penyiapan dan mewujudkan peserta didik yang memiliki orientasi spiritual kepada Allah Swt tapi juga memiliki kepedulian serta moralitas sosial yang baik. Karena itu, dalam konteks makro maka untuk mengetahui bagaimana perspektif pembangunan suatu pemerintah/negara dirumuskan maupun pembacaan bangsa tersebut terhadap sejarah masa depan, dapat dilihat dari politik pembangunannya, terutama kebijakannya di bidang pendidikan. Sebab bagaimanapun ”setiap kebijakan pendidikan merefleksikan pilihan-pilihan politik, tradisi, nilai dan konsepsi masa depan sebuah negara” itu sendiri.[66] Di sini pendidikan tidak hanya berfungsi mengembangkan potensi individu-individu dalam masyarakat tapi juga ikut memengaruhi kualitas kehidupan negara secara luas, sebagaimana ditegaskan Razik&Swanson bahwa “*education deals with matters that relate to the heart and soul of the individual citizen and, the same time, is critical to the political and economic welfare of the nation and its security*”.[67]

E. Penutup

Dari uraian tersebut di atas dapat diambil dua kesimpulan penting berkaitan dengan tantangan pendidikan Islam. *Pertama*, di luar fungsi umum untuk memandirikan peserta didik, pendidikan Islam tidak hanya diarahkan untuk membentuk moralitas dan kesalehan individu dalam hubungannya dengan Allah Swt tapi juga diharapkan mampu membentuk moralitas sosial yang utuh. *Kedua*, pendidikan Islam diharapkan tidak hanya melahirkan peserta didik yang selalu taat dan memiliki ikatan spiritual dengan Tuhannya tapi dapat melahirkan warga negara yang demokratis, humanis dan toleran.

[65] HAR Tilaar & Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 267-268.
[66] UNESCO, *Learning to be* (Paris: UNESCO, 1972), h.170 .
[67] T. Razik& A. Swanson, *op. cit*., h. 377.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEPUSTAKAAN

Abdullah, M. Amin, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

----------, "Agama dan (Dis) Integrasi Sosial: Tinjauan Materi dan Metodologi Pengajaran Agama (Kalam dan Teologi) dalam Era Kemajemukan di Indonesia" Jurnal *Ulumuna*, Vol. 3 No. 2, Mei-Juli 2000. Mataram: STAIN Mataram.

----------, "*Religious Studies in Indonesia: Rethinking atau Reinforced?* Makalah Diskusi Publik "Rethinking Religious Studies in Indonesia", *Center for Religious and Cross-Cultural Studies*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 26 Juni 2010.

Abdul Wahid, "Tendensi Antipluralisme Dalam Pendidikan Agama Islam: Kritik Teks Buku Ajar PAI SMU/SMK", Jurnal *Ulumuna*, Vol. VII, Edisi 2, Juli-Desember 2003. Mataram: STAIN Mataram.

Adib, Noblana, "Multicultural Education: A Study of Religious Education Textbooks Used in Elementary School in Indonesia" dalam *Kumpulan Makalah The 11TH Annual Conference on Islamic Studies*. Jakarta: Dirjen DIKTIS Kemenag-STAIN Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung, 2011.

Andi Rasydianah "Butir-butir Pengarahan Dirjen Binbaga Islam" pada *Acara Pelatihan Peningkatan Wawasan Ilmu Pengetahuan dan Kependidikan Bagi Dosen Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum*, Bandung, 11 September 1995.

CE. Beeby, *Pendidikan di Indonesia: Penilaian dan Pedoman Perencanaan*, terj. BP3K dan YIIS. Jakarta: LP3ES, 1982.

Dirjen Binbaga Islam Depag, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, Buku Kedua. Jakarta: Dirjen Binbaga Islam, 2002.

Effendi, Djohan "Pluralisme Realitas Sosial dan Hubungan Antaragama" dalam Mursyid Ali (Editor), *Pluralitas Realitas Sosial dan Hubungan Antaragama*. Jakarta: Balitbang Proyek Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama, 2000.

Fadjar, A.Malik, *Visi Pembaruan Pendidikan Islam*. Jakarta: LP3NI, 1998.

HAR. Tilaar, *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

HAR. Tilaar & Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Razik, T&Swanson, A, *Fundamental Concepts of Educational Leadership and Management*. New Jersey: Prentice-Hall, 1995.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Smart, Ninian. "Kata Pengatar" dalam Peter Cannoly (ed), *Aneka Pendekatan Studi Agama*, terj. Imam Khoiri. Yogyakarta: LKiS, 2011.

Syukri "Pendidikan Islam dalam Konteks Politik Pendidikan Nasional" Jurnal *Ulumuna* Vol. VII, Edisi 12 No. 2, Juli-Desember 2003. Mataram: STAIN Mataram.

Tafsir, Ahmad. *Metodologi Pengajaran Agama Islam*. Bandung: Rosdakarya, 2003.

UNESCO, *Learning to be*. Paris: UNESCO, 1972.

UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Putra, Heddy Shri Ahimsa, "Indonesia Cultural Pluralism Without Multiculturalism?" in Frank Dhont, Kevin W. Fogg, Mason C. Hoadley (ed.), *Towards an Inclusive Democratic Indonesia Society*, tp.tt.

Langgulung, Hasan, *Asas-Asas Pendidikan Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1988.

Mahfud, Choirul. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Muhaimin, *Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2003.

Ni'am, Syamsun "Islam dan Pendidikan Multikultur di Indonesia" Jurnal *Fitrah* Vol. 2, No. 1, Maret 2010. Bima: STIT Sunan Giri.

Whaling, Frank, "Pendekatan Teologis" dalam Peter Cannoly (ed), *Aneka Pendekatan Studi Agama*, terj. Imam Khoiri. Yogyakarta: LKiS, 2011.

Wijoyo, Alex Soesilo, "Globalisasi dan Pluralisme Agama" Jurnal *Ulumuna*, Vol. 3 No. 2, Mei-Juli 2000. Mataram: STAIN Mataram.

Wiebe, Donald, "Religious Studies" in John R. Hinnells (ed), *The Routledge Companion to the Study of Religion*. London: Routledge, 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id